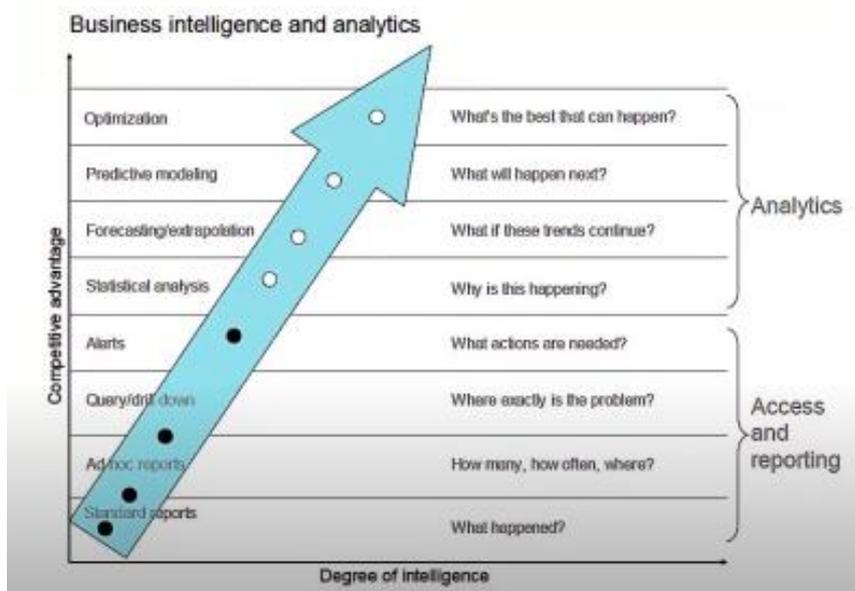


Agenda	Sosialisasi Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 16/2020 Tentang Manajemen Data SPBE
Waktu	Rabu, 24 Maret 2021
Penyelenggara	Bappenas

Data Management - Dr. Gerry Firmansyah (Ketua Dewan TIK Nasional, Akademisi UI)

- **Data is the new oil** → minyak bumi harus kita gali, kita olah agar dapat bermanfaat. Begitupun data, butuh digali dan dikelola agar bermanfaat.
- Manajemen data : 1) Kumpulkan data; 2) Pastikan data berkualitas, konsistensi, dan *confidential* nya; 3) Olah datanya; 4) Dapatkan *value*
- Level kondisi manajemen data di instansi :



Level paling bawah : **standard report**. Hanya ada data yang dilaporkan saja, menjawab pertanyaan, **what happened**.

Baru meningkat ke atas sedikit demi sedikit, jangan langsung berprinsip **ADA DATA BISA DIANALISIS**, harus melalui langkah-langkah dulu, **PASTIKAN MANAJEMEN DATA YANG BAIK**.

- Isu selama ini : **saat entry data**.
- **Arsitektur data** : *Conceptual Model* (untuk level pimpinan) → *Subject Area Model* (berisi logical dan physical data model, untuk acuan pengembangan sistem ke depannya)
- **Data itu mahal, tapi data tanpa perencanaan itu lebih mahal**

Petunjuk Teknis Metadata Statistik – Triana Ratnaningsih (BPS)

- **Metadata??** Informasi yang menggambarkan data statistik. DNA nya data. Yang membedakan data satu dengan yang lainnya. Contoh : terminologi, definisi, klasifikasi data, manfaat, dsb.
- Peraturan yg menjelaskan metadata statistik: **Peraturan BPS Nomor 5/2020**
- Struktur Baku Metadata Kegiatan Statistik dapat dilihat di Peraturan BPS

Standar dan Metadata Keuangan Negara - ... (Kemenkeu)

- Menyelenggarakan **Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)**
- Dukungan Pemda untuk SIKD Nasional :
 1. Menyediakan data dan informasi yg memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, laporan, dsb

2. Menyampaikan data/informasi tepat waktu
3. Menyiapkan aturan mengenai Perencanaan, Pengembangan, dan Pemeliharaan SIKD Daerah, serta Arsitektur SIKD Daerah
4. Menyiapkan infrastruktur pendukung SIKD untuk aplikasi agen SIKD dan komunikasi data SIKD
5. Menyiapkan SDM

Petunjuk Teknis Standar Data Statistik - Shafa Rosea (BPS)

➤ Walidata tingkat daerah :

1. Memeriksa kesesuaian data
2. Menyebarkan data dan metadata di portal SDI
3. Membantu Pembina data pusat

➤ Contoh Standar Data :

Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
Sampah	Sisa kegiatan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat	1. Sampah rumah tangga 2. Sampah industri 3. Sampah medis	Jumlah, Persentase	Ton, Persen
Perkotaan	Suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, seperti jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.	1. Megapolitan 2. Neopolitan 3. Metropolitan	Jumlah, Persentase	Daerah, Persen

- Produsen data Kab/Kota mengajukan/menyusun standar data → Walidata Kab/Kota memeriksa apakah standar data sudah sesuai (duplikasi, dsb) → Walidata Povinsi memeriksa usulan walidata kab/kota di bawahnya dan OPD tingkat provinsi → Walidata Provinsi mengklasifikasikan berdasarkan K/L Pembina → meneruskan walidata K/L terkait → Walidata K/L meneruskan ke BPS

Standar Data Geospasial - Syamsul Hadi (Koord Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial BIG)

- Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) : pemberian kode dan struktur kode, pendokumentasian grografi
- KUGI → *kugi.ina-sdi.or.id*
- Cara menyusun metadata yang benar → dilakukan oleh produsen data. Walidata melengkapi.
- Apabila pemda sudah memiliki Geoportal → Standar metadata terpenuhi sehingga dapat dikembangkan berbagai model integrase
- Arsitektur data geospasial : arsitekrut SJ dan PSJ
- Data Induk & Data Referensi :
1. Master data dapat digunakan berulang
 2. Master data tidak berubah-ubah dalam waktu lama dan ada penetapan
 3. Data Induk sebaiknya sesuai peraturan UU (misal : batas wilayah dan NIK)
 4. Data Referensi seperti dalam KUGI (misal klasifikasi Pendidikan SD, SMP, SMA)
 5. Kode Referensi contohnya adalah kode Sekolah
 6. Harmonisasi master data dengan seluruh Pembina data

➤ Basis data

1. Data Modelling : KUGI dan Metadata (PermenPPN 16/20: pasal 16 ayat 2A)
2. Data Storage : DB Prod, Man, Pub (PermenPPN 16/20: pasal 16 ayat 2B)
3. Data Security : backup dan klasifikasi keamanan data (PermenPPN 16/20: pasal 16 ayat 2E)
4. Data Integration : penyebaran melalui Portal SDI (PermenPPN 16/20: pasal 16 ayat 2D)

➤ Untuk pembinaan standar data : info@big.go.id

Q&A

➤ **Apakah Pemda wajib membuat regulasi dalam bentuk Perkada untuk menjalankan kegiatan satu data di daerah?**

Dua prioritas yang perlu dilakukan segera di tingkat daerah :

1. Penyusunan SK Penunjukan Koordinator, Walidata, dst.
2. Penerbitan Regulasi tingkat daerah. (Bappenas menyediakan template regulasi, dapat kontak CP)
3. Membuat portal masing-masing di daerah (akan didampingi)
4. Mengaktifkan forum satu data daerah

➤ Bappeda memiliki wewenang sebagai koordinator perencanaan pengumpulan data setiap tahunnya → walidata dan produsen data merealisasikan → disesuaikan dengan prinsip SDI.

➤ Menyusun RENJA → merencanakan akan memproduksi data apa saja

➤ Yang ditetapkan di pusat adalah **FORMAT METADATA**

➤ Batasan untuk Diskominfo?

Sebelum sampai ke analytics, perbaiki dulu manajemen data dan infrastrukturnya.

Link Materi : bit.ly/MateriSosialisasiPermenSPBE

Notulis,

Astuti Purwaningsih